

# INVASI PASUKAN KOALISI: KEBANGKITAN ATAU KETERPURUKAN KEHIDUPAN SOSIAL-POLITIK PEREMPUAN IRAK

**Hafiza Aryaputri**

(Program Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia

Kampus UI Salemba )

*aryaputrihafiza@yahoo.com*

**Abstract:** *Iraq once touted as the Middle Eastern country that offers freedom to women. However, the fall of Saddam's regime in April 2003 by the Coalition Forces has brought the Iraqi women in to uncertain change. One of the Coalition Forces agenda to Iraq was to set UN Security Council Resolution No.1483 to improve the lives of Iraqi women in a stable democratic system. But until the withdrawal of Coalition Forces in 2011, the lives of women in Iraq remain decayed. The purpose of this study was to assess descriptively the changes occurred in Iraq under the regime of Saddam Hussein (1979-2003) and under the Coalition Forces invasion (2003-2011). Method used was qualitative approach by interviewing some Iraqi emigrants in Malaysia with additional of literature review. Result of this study showed that women conditions in Iraq during the invasion has worsened. Even some Iraqis claimed prefer to live in Saddam's era rather than the time of Coalition Forces presence.*

**Keywords:** *Iraq Women, Socio-Political, The UN Security Council Resolution and Coalition Forces*

**Abstrak:** *Irak pernah disebut-sebut sebagai salah satu negara Timur Tengah yang menawarkan kebebasan kepada perempuan. Hal ini dikarenakan oleh salah satu ideologi awal sosialisme partai Ba'ath Irak adalah pembebasan perempuan dan kesetaraan. Akan tetapi di bawah rezim Saddam, rakyat Irak termasuk perempuan diklaim mengalami represi. Rezim Saddam semakin menjauh dari cita-cita sosialis Arab dan toleransi terhadap perempuan di ranah sosial-politik dirasakan semakin berkurang. Jatuhnya rezim Saddam pada April 2003, membawa Irak dan perempuan yang hidup di dalamnya kepada perubahan yang tidak pasti. Salah satu agenda Pasukan Koalisi, seperti yang termaktub di Resolusi DK PBB No.1483 adalah untuk memperbaiki kehidupan perempuan Irak dalam sebuah sistem demokrasi yang stabil. Permasalahannya adalah bahwa hingga ditariknya Pasukan Koalisi pada tahun 2011, kehidupan perempuan di Irak masih buruk. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji perubahan yang terjadi secara deskriptif antara rezim Saddam Hussein (1979-2003) dengan saat invasi pasukan koalisi (2003-2011) sesuai dengan agenda Resolusi DK PBB No.1483. Metode kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai beberapa pengungsi Irak di Malaysia dengan tambahan kajian pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk dua periode tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa kondisi di Irak saat invasi lebih buruk daripada saat rezim Saddam Hussein. Bahkan beberapa warga Irak mengaku lebih memilih untuk hidup di era Saddam dibandingkan dengan setelah hadirnya Pasukan Koalisi.*

**Kata kunci:** *Perempuan Irak, Sosial-Politik, Resolusi DK PBB dan Pasukan Koalisi*

## PENDAHULUAN

Status dan posisi perempuan pada masyarakat telah menjadi suatu masalah yang klasik. Budaya di dunia sejak zaman sebelum masehi hingga abad ke-21 ini masih mempersoalkan tentang peranan perempuan dalam kehidupan sosial maupun politik. Perempuan masih diragukan kemampuannya untuk terjun langsung ke dalam masyarakat, seperti untuk belajar, bekerja, berpolitik dan bahkan untuk beribadah. Akibat pemasangan terhadap hak kepada perempuan ini, terjadilah pergerakan-pergerakan yang lebih dikenal dengan *'feminist movements'* di Barat yang bertujuan untuk membebaskan atau meliberalisasikan perempuan.

Perempuan di Barat mengalami ketidakadilan sejak zaman Yunani, dan bisa dibuktikan dengan buah pikiran filsuf-filsuf zaman tersebut yang menyatakan tentang keterbelakangan perempuan dibandingkan dengan lelaki. Sejak Plato hingga Hegel, mereka selalu beranggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang *"less virtuous, less spiritual dan less rational"*. Thomas Hobbes dan John Locke pada abad ke-17, menyatakan bahwa: *"women as physically and intellectually inferior to men and incapable of playing any political role"* (Zeenath Kausar, 2007: 13). Hal tersebut

mengindikasikan bahwa dalam pandangan pemikir-pemikir terdahulu, perempuan adalah makhluk kelas dua yang derajatnya lebih rendah dari pria.

Budaya patriarki yang kental juga dirasakan oleh perempuan di Timur Tengah, sehingga mereka mengalami hal yang serupa dalam hal pengekangan hak, terutama sebelum datangnya Islam. Di Irak, kepemimpinan Saddam Husein tahun 1979, pemerintahan Irak menjadi rezim yang otoriter dan represif. Pada awalnya, Irak disebut-sebut sebagai salah satu dari Negara Timur Tengah yang menawarkan kebebasan berpolitik kepada kaum perempuan. Sosialisme Arab dari Partai Ba'ath Irak termasuk dalam ketentuan ideologi yang membebaskan perempuan dan menjamin kesetaraan. Setelah Saddam resmi menjabat Presiden Irak, terjadilah perang berkelanjutan. Keterpurukan ekonomi dan kentalnya budaya patriarki arab membuat rezim Ba'ath yang dipimpin Saddam jauh dari cita-cita sosialis Ba'ath, dan lebih dekat dengan interpretasi Islam tradisional, termasuk toleransi perempuan di dunia publik.

Perlakuan Saddam Husein yang represif, membuat rezim ini mendapat tekanan dari dalam dan luar negara Irak. Tekanan dari dalam negara berasal dari kedua kelompok Irak yang merasa termarginalisasi, Syi'ah dan Kurdi, yang melakukan gerakan melawan rezim

Saddam. Tekanan dari luar berasal dari Pasukan Koalisi Serikat dan sekutunya.

Pasca tragedi 11 September, Pasukan Koalisi datang ke Irak dengan dalih mengamankan senjata pemusnah massal yang dimiliki rezim Saddam dan berhasil melakukan invasi terhadap Irak dengan maksud menyingkirkan Saddam dari kekuasaan karena dianggap bekerjasama dengan teroris. Pasukan Koalisi yang berada di Irak tersebut, juga menjanjikan untuk menjamin kesetaraan hidup rakyat Irak, termasuk perempuan. Perempuan Irak merasa terkekang semasa rezim Saddam, sehingga menyambut gembira kedatangan pasukan koalisi dengan harapan mendapat kehidupan lebih baik dari rezim Saddam. Hal ini tercermin dari antusiasme perempuan Irak yang ikut turun ke jalan untuk menyambut kedatangan Pasukan Koalisi. Perempuan Irak juga mulai aktif dalam kehidupan politik, seperti di parlemen dan organisasi. Misalnya, terbentuknya *Organization of Women's Freedom in Iraq* (OWFI) tahun 2003 yang diprakarsai Yanar Mohammed, salah satu aktivis feminis Irak.

Pasca perang Irak-Iran, kediktatoran Saddam sangat dirasakan oleh perempuan. Organisasi perempuan tidak diizinkan mengorganisir diri mereka sendiri. Hanya Federasi Umum Perempuan Irak (*The General Federation of Iraqi*

*Women*) satu-satunya organisasi perempuan yang diperbolehkan.

Situasi perempuan di Irak merosot signifikan setelah tahun 1990. Pasukan Koalisi Serikat memulai serangannya terhadap Irak, dengan salah satu misi meningkatkan kehidupan perempuan Irak dan termaktub dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1483 tahun 2003: “*rule of law that affords equal rights and justice to all Iraqi citizens without regard to ethnicity, religion, or gender* (L. Brown & D. Romano, 2006 : 51). Adanya DK PBB membuat Pasukan Koalisi mengusung feminisme sebagai salah satu alasan minor memasuki Irak.

Invasi Pasukan Koalisi Serikat dan sekutunya, memiliki efek pada kehidupan sosial-politik perempuan. Mayoritas perempuan mengharapkan Pasukan Koalisi menghapus diskriminasi di rumah, masyarakat dan di lapangan pekerjaan dengan menerapkan sistem demokrasi. Sayangnya, perempuan Irak segera menyadari bahwa kedatangan Pasukan Koalisi Serikat bukan akhir untuk mencapai kebebasan dalam kehidupan sosial-politik mereka. Hingga tahun 2011, Pasukan Koalisi tidak memenuhi janjinya dan penawaran hak dan kesempatan yang lebih baik bagi perempuan Irak ternyata bukan bagian penting dari agenda mereka datang ke Irak. Perempuan Irak merasa,

kehidupan mereka justru lebih baik saat di bawah rezim Saddam.

Tujuan penelitian ini adalah, 1) memberikan gambaran kehidupan sosial-politik perempuan Irak dalam tekanan rezim otoriter, padahal berlandaskan hukum Islam; 2) memberikan gambaran kehidupan sosial-politik perempuan Irak setelah pemerintahan baru yang belum stabil; 3) mengkaji perubahan secara deskriptif antara rezim Saddam (1979-2003) dengan saat invasi pasukan koalisi (2003-2011) sesuai agenda Resolusi DK PBB No.1483.

Teori yang digunakan untuk membedah permasalahan adalah teori gender dan feminisme. Teori ini dielaborasi dengan konsep kekerasan terhadap perempuan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Studi Kasus (*Case Study*). Lokasi penelitian di Jakarta dan Malaysia. Kajian ini berlangsung selama enam bulan dimulai bulan Juni– Desember 2012.

Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen. Wawancara dan data tertulis berupa: 1) Wawancara dengan Shahad Mustafa, perempuan Irak yang belajar di International Islamic University Malaysia, pada tanggal 19 September 2012

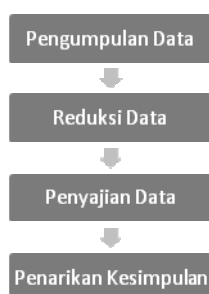
di Malaysia; 2) Wawancara dengan Abu Shahad (bukan nama asli), warga Irak yang pindah ke Malaysia sejak tahun 2008, pada tanggal 20 September 2012 di Malaysia; 3) wawancara dengan Umi Shahad (bukan nama asli), perempuan Irak yang pindah ke Malaysia sejak tahun 2008, pada tanggal 20 September 2012 di Malaysia; 4) wawancara dengan Sheren Alhiti, perempuan Irak yang belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia, pada tanggal 20 September 2012 di Malaysia; 5) wawancara dengan Assoc. Prof. Ishtiaq Hossain, pengamat Timur Tengah, Dosen *Political Science* pada International Islamic University Malaysia, pada tanggal 19 September 2012 di Malaysia dan KUHP Irak tahun 1969 Pasal 111.

Data sekunder meliputi teks-teks tertulis, yang berupa *fact sheet*, dokumen, buku, artikel, jurnal, surat kabar, majalah, maupun situs resmi di internet dan data audio-visual berupa video rekaman wawancara yang membahas mengenai negara Irak semenjak rezim Saddam Husein hingga ditariknya Pasukan Koalisi terakhir (1979-2011). Data tersebut diperoleh dari: perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, perpustakaan FISIP Universitas Indonesia, perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Indonesia, perpustakaan LIPIA, perpustakaan *Islamic Cultural Center* (ICC), dan perpustakaan

Jenis data dan informasi yang dikumpulkan berupa: akses perempuan dalam politik (partisipasi dalam pemilu dan parlemen); perempuan Irak dalam pendidikan, dalam hal persentase buta aksara dan kesempatan belajar; kesempatan bekerja perempuan Irak; dan kekerasan terhadap perempuan Irak di dalam rumah tangga dan masyarakat.

Setelah dipelajari, data-data tersebut akan direduksi untuk diidentifikasi, dipisahkan, dan dikelompokkan untuk kembali dianalisa. Tahapan selanjutnya adalah penyajian data, untuk menjelaskan temuan-temuan data dan informasi secara deskripsi. Terakhir, data dan informasi yang telah dideskripsikan disimpulkan untuk mencapai suatu penelitian yang sempurna. Bagan analisis dan pola analisa data kasus pada penelitian ini adalah:

Bagan 1. Analisis data



Bagan 2 Pola Analisis data kasus:



## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kehidupansosial-politik perempuan Irak (1979 - 2011)

Untuk mengetahui kehidupan sosial-politik perempuan Irak selama tahun 1979-2011 perlu dibandingkan antara data-data keadaan perempuan Irak pada tahun 1979-2003 dan 2003-2011. Selain itu, sangat perlu juga diketahui tanggapan dari beberapa responden yang merupakan warga negara Irak dan dari pengamat Politik Timur Tengah. Karena sulitnya akses untuk mewawancarai Duta Besar Irak untuk Indonesia, maka demi menunjang validitas kajian ini, penulis mewawancarai secara langsung beberapa warga Irak yang ada di Malaysia.

Responden pertama adalah Shahad Mustafa, seorang mahasiswi berusia 21 tahun dari Irak yang kuliah di *International Islamic University Malaysia*. Ia telah meninggalkan Irak sejak tahun 2008 dan mengalami masa transisi Irak menjadi negara demokrasi. Responden kedua adalah ayah dari Shahad Mustafa, dan

responden ketiga adalah Ibu dari Shahad Mustafa. Akan tetapi dengan alasan keamanan mereka tidak ingin dicantumkan nama maupun biodata mereka. Oleh sebab itu untuk selanjutnya ayah dan ibu dari Shahad Mustafa akan disebut sebagai Abu Shahad dan Umi Shahad. Responden Irak terakhir adalah Sheren Alhiti mahasiswi Phd. (S3) Universitas Malaya yang berusia 28 tahun dan telah meninggalkan Irak sejak tahun 2000. Selain itu wawancara juga melibatkan pengamat politik Timur Tengah yaitu Assoc. Prof. Ishtiaq Hossein yang merupakan dosen *Political Science* di International Islamic University Malaysia dengan sub-spesialisasi *International Security Order; Geopolitics of the Muslim World*. Keseluruh wawancara ini berlangsung di Malaysia pada tanggal 19-22 September 2012.

### 1. Perempuan Irak dalam politik

Setelah Preseiden Saddam Hussein memerintah, pada tahun 1980 perempuan Irak untuk pertama kalinya mendapat kesempatan untuk ikut dalam Pemilu. Akan tetapi Irak juga dikenal dengan sebutan “*The One-Party State*” yang berarti hanya satu partai yang berkuasa. Sehingga selama Saddam Hussein memerintah, secara otomatis kesempatan memilih dalam Pemilu hanyalah kesempatan yang semu. Hal ini senada dengan yang disampaikan Abu Shahad

dalam wawancara, ketika ditanya apakah ada akses untuk perempuan dalam pemilu dan ia menjawab: “Ada, namun tidak pernah ada pemilu yang sebenarnya pada masa Saddam karena ia adalah diktator. Namun di dalam parlemen ada beberapa perempuan yang duduk di dalamnya”. Oleh sebab itu sulit untuk membandingkan data antara perempuan yang mengikuti Pemilu pada era Saddam dan sesudahnya. Sedangkan dalam pemerintahan, tercatat dalam data IPU bahwa semasa rezim Saddam memang tercatat beberapa perempuan yang tergabung di dalamnya. Akan tetapi angka ini tidak seberapa dibandingkan setelah Saddam digulingkan

**Tabel 1.**

#### Data perempuan Irak dalam parlemen

| Year       | Rank   | Lower or Single House |       |       |      | Upper House or Senate |       |       |    |
|------------|--------|-----------------------|-------|-------|------|-----------------------|-------|-------|----|
|            |        | Election              | Seats | Women | %W   | Election              | Seats | Women | %W |
| 25/12/1997 | 68/177 | 03/1996               | 250   | 16    | 6.4  | --                    | --    | --    | -- |
| 31/1/2003  | 94/188 | 03/2000               | 250   | 19    | 7.6  | --                    | --    | --    | -- |
| 28/2/2006  | 26/187 | 12/2003               | 275   | 70    | 25.5 | --                    | --    | --    | -- |
| 31/12/2011 | 38/189 | 3/2010                | 325   | 82    | 25.2 | --                    | --    | --    | -- |

Sumber: Inter-Parliamentary Union (IPU) statistical data <http://www.ipu.org/wmn-e/arc/classif280206.htm2>.

### 2. Perempuan Irak dalam pendidikan

Terdapat tiga hukum pendidikan yang disahkan pada tahun 1970-an, yaitu: Hukum Pemberantasan Buta Huruf pada tahun 1971, Hukum Pendidikan Gratis pada tahun 1974 dan Undang-Undang Wajib Belajar pada tahun 1978<sup>1</sup>. UU Pendidikan Wajib membuat pendidikan

dasar wajib untuk semua warga Irak, yaitu minimal enam tahun pertama. Undang-undang ini merupakan terobosan baru baik bagi Irak maupun daerah Timur Tengah. Undang-Undang ini diberlakukan untuk semua warga Irak di berbagai tingkat sosial dan ekonomi, termasuk bagi anak perempuan Irak.

Setelah pemerintah menasionalisasi semua saham perusahaan minyak pada tahun 1973, pendapatan masyarakat terus meningkat hingga tahun 1981. Pada tahun 1978, pemerintah Irak meluncurkan kampanye “*National Comprehensive Campaign for Eradication of Illiteracy*” yang merupakan kampanye pemberantasan buta aksara untuk warga Irak yang berusia antara 15 sampai 45 tahun. Hasil dari kampanye ini mencapai kesuksesannya pada tahun 1990 dengan tingkat buta aksara yang hanya 12%<sup>10</sup>. Menurut UNESCO, Irak mampu mengembangkan pendidikan dan menurunkan tingkat buta huruf pada tahun 1985.

*The education system in Iraq prior to 1991 was one of the best in the region, with over 100% gross enrolment rate for primary schooling, and a high level of literacy, both of men and women. The Higher Education, especially the scientific and technological institutions, were of an*

*international standard, staffed by high qualification personnel*<sup>2</sup>

Di bawah pendudukan Pasukan Koalisi, proses politik menjadi pro kepada Syi’ah. Perempuan Irak saat ini juga tidak bisa pergi keluar tanpa jilbab dan pendamping laki-laki, bahkan untuk pergi ke sekolah<sup>3</sup>. Perempuan Irak sering kali mangkir ke sekolah akibat takut menjadi sasaran penculikan dan pemerkosaan oleh milisi. Tingkat buta aksara perempuan dan anak perempuan Irak juga mengalami peningkatan di bawah pendudukan Pasukan Koalisi. Data menunjukkan bahwa 50% perempuan yang berusia 15 – 24 tahun dan tinggal di daerah pedesaan buta huruf, sedangkan tingkat buta aksara di sebagian besar wilayah Irak tahun 2007 berkisar antara 25% - 65% dari penduduk.

### **3. Perempuan Irak dalam pekerjaan**

Pada masa awal pemerintahan Saddam, ia pernah mengatakan tentang pentingnya peranan perempuan Irak:

*“Despite backward conditions which handicapped a great deal of her energies, the woman in our country has really played a distinguished part in the struggle of our people for liberation from colonialism, and to get rid of reactionary and dictatorial systems, and to achieve the*

*national aims in Unity, Liberty and Socialism.*"<sup>4</sup>

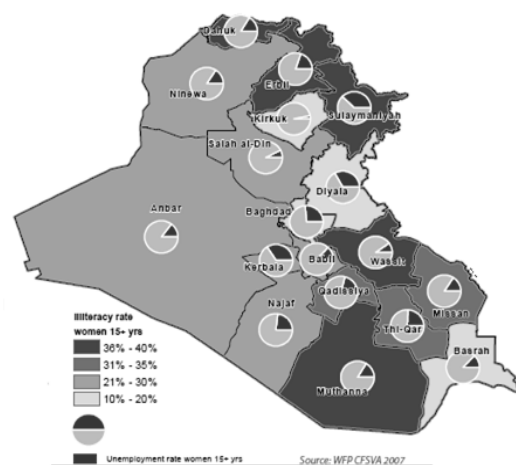
Dengan kata lain ia menyatakan bahwa perempuan Irak juga memainkan peran untuk mencapai tujuan nasional yang berupa persatuan, kebebasan dan sosialisme. Tingginya partisipasi perempuan yang bekerja pada masa pemerinthan Sadam dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. Persentase karyawan perempuan berdasarkan profesi di Irak pada tahun 1993**

| Profesi   | Persentase Perempuan dari Total Karyawan |
|---|--|
| Posisi administrasi: staf, sekretaris, panitera | 56                                       |
| Kegiatan Jual Beli                              | 53                                       |
| Spesialis dan teknisi                           | 52                                       |
| Jasa  | 27                                       |
| Legislator, kepala administrasi, direktur       | 12                                       |
| Total   | 47%                                      |

Sumber: UNICEF, "Situation analysis of children and women in Iraq". Reported in April 30,1998. Souad Al-Azzawi. (2011, March 9-11). *Decline Of Iraqi Women Empowerment Through Education Under the American Occupation of Iraq 2003-2011*, p. 12

Namun sejak tahun 2003, rendahnya tingkat pendidikan perempuan memiliki dampak negatif pada tenaga kerja Irak. Tingkat pengangguran sebanyak 8% secara nasional yang berarti bahwa terdapat 653.000 orang yang menganggur, terdiri dari 496.000 laki-laki dan 157.000 adalah perempuan<sup>10</sup>. Secara nasional, hanya 14% dari total perempuan yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan, atau satu dari lima orang perempuan merupakan pengangguran<sup>5</sup>. Pada data lain menunjukkan bahwa sejak tahun 2008 tenaga kerja perempuan mengalami penurunan sementara tingkat pengangguran mengalami kenaikan. Seperti yang digambarkan oleh gambar dibawah.



**Gambar 1. Tingkat Pengangguran pada Perempuan Usia 15 Tahun Keatas**

Sumber: Inter-Agency Informations and Analysis Unit (2012, March). *Women in Iraq Fact Sheet*.

#### 4. Perempuan Irak dan kekerasan

##### a. Kekerasan dalam rumah tangga

Pada masa pemerintahan Saddam Hussein, sebagian besar hukum Irak didasarkan pada berbagai sumber, termasuk hukum Islam dan hukum adat. Sehingga beberapa kebijakan hukum mengenai kekerasan pada perempuan, dianggap kurang menguntungkan kaum perempuan. Baik karena konteks hukumnya maupun karena interpretasi kultur masyarakat. Salah satu hukum yang dipermasalahkan oleh para feminis adalah *Penal Code* (KUHP Irak tahun 1969 Pasal 111). Kasus pemerkosaan, penculikan, kekerasan dalam rumah tangga, prostitusi, dan pembunuhan ahli keluarga perempuan yang dianggap memalukan demi menjaga kehormatan keluarga (*honour crimes*) dibahas dalam Pasal ini.

Akan tetapi yang menjadi topik bahasan feminis adalah ringannya hukuman bagi para pelaku kekerasan terhadap perempuan, dimana dari keseluruhan Pasal menyatakan pelaku bisa bebas dari tuntutan hukum jika pelaku menikahi korban. Selain itu yang menjadi tinjauan utama mereka adalah ringannya hukuman bagi pelaku *honour crimes* yang hanya dijatuhi hukuman tidak lebih dari 3 tahun kurungan penjara. Poligami pada masa Saddam juga diizinkan, namun hanya dengan persetujuan dari pengadilan Islam di Irak dan seorang istri berhak untuk

meminta cerai jika suaminya tidak dapat memenuhi kebutuhannya hidup yang baik secara jasmani maupun batin. Akan tetapi dalam prakteknya, undang-undang tersebut sering tidak ditegakkan.

Pada 29 Desember 2003, pemimpin Irak sementara yang ditunjuk oleh AS, Abdul Aziz Al-Hakim (pemuka agama Syi'ah) menetapkan kebijakan baru berlandaskan agama. Peraturan ini mencakup masalah perkawinan, perceraian, hak asuh anak, warisan, dan segala sesuatu mengenai individu yang berhubungan dengan keluarga. Namun peraturan ini ditolak oleh perempuan Irak karena dianggap memberatkan mereka. Pasca invasi pasukan AS ke Irak, dilaporkan bahwa, tindakan pembunuhan demi kehormatan meningkat secara dramatis. Data lain menyebutkan bahwa satu dari lima perempuan (21%) berusia 15 - 49 telah mengalami kekerasan fisik di tangan suami mereka, 33% mengalami kekerasan emosional, dan 83% mengalami pengekangan oleh suami.

##### b. Kekerasan di luar rumah

Pada kekerasan di luar rumah, data yang ditemukan, 47 % dari mereka yang diwawancarai oleh The Journal of American Medical Association (JAMA) mengalami pelanggaran berikut, baik yang dialami oleh mereka sendiri maupun oleh anggota keluarga mereka sejak tahun 1991:

penyiksaan, pembunuhan, penculikan, wajib militer paksa, pemukulan, luka tembak, hilang, disandera, dan amputasi telinga, 53 % dari pelanggaran tersebut yang terjadi antara 1991 dan 1993 diidentifikasi dilakukan oleh kelompok rezim Saddam. Angka tersebut di atas melonjak 30 % antara tahun 2000 hingga 6 bulan pertama tahun 2003 setelah pemberontakan Syi'ah.

Di lain pihak, dinyatakan bahwa perempuan Irak sejak tahun 1950-an hingga tahun 2000-an bebas keluar rumah tanpa mengenakan hijab. Hijab bukan merupakan suatu kewajiban bagi perempuan muslim Irak. Hal ini dikemukakan oleh Shahad Mustafa yang menyatakan dirinya tidak berjilbab saat masih di Irak dulu. Begitu pula ibunya yang selalu mengenakan baju kasual ataupun rok pada saat remajanya. Hal ini juga dilontarkan oleh Yanar Mohammad: *"we used to walk in the streets of Baghdad in modern dress, in mini-skirts."*<sup>6</sup> Menurut para responden perempuan yang diharuskan memakai abaya hanya di bagian pinggiran Irak dengan mayoritas kaum Syi'ah.

Akan tetapi, situasi perempuan Irak justru telah mengalami penurunan kondisi sejak tahun 2003. Diperkirakan bahwa lebih dari 100.000 warga sipil tewas di Irak antara tahun 2003 dan tahun 2011 setelah invasi AS, dan terdata lebih dari 4,5 juta

warga Irak hidup sebagai pengungsi dengan perkiraan bahwa lebih dari 83 persennya adalah perempuan dan anak-anak, juga terdapat sekitar 4.000 perempuan Irak telah menghilang sejak invasi 2003 yang diyakini telah diperdagangkan untuk eksploitasi seksual<sup>12</sup>. Perempuan Irak juga telah banyak menjadi target kekerasan di luar rumah dalam beberapa tahun belakangan ini. Penargetan ini berdasarkan profesi (baik sebagai politisi, jurnalis, aktivis ataupun PNS), maupun karena alasan agama dan etnis. Kekerasan yang dialami perempuan Irak di luar rumah bisa berupa teguran, perkosaan, hingga pembunuhan. Perlakuan ini dilakukan oleh anggota kelompok bersenjata Islam, milisi, pasukan pemerintah Irak, pasukan tentara asing, dan staf keamanan militer swasta asing.

Paparan data-data di atas didukung oleh pernyataan para responden yang menyatakan bahwa kehidupan perempuan dimasa rezim Saddam Hussein lebih baik. Seperti yang dinyatakan oleh Abu Shahad:

*"From 1920-2003 you can consider it as one period. Saddam as I told you, he made mistake and a lot of mistakes, but at least, just for example no one can attack any house or detain anyone. They must took the, as we called it the Mochtar, any security device or any police or intelligent can not*

*attact any house in Iraq directly. They must take the chieve of the council of neighbourhood and took old man from the neighbourhood to go to the house if they want to detain any person in that house. In general the shi'i now with the women affair, its a shi'i government. So if we want to see how they are going to act with the women affair. They are going to act according to their religion. Their religion for example allow the mut'ah. during Saddam it was not allowed for all. And the mut'ah marrige is lower degree for respect of women”*

Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi yang diusung oleh Pasukan Koalisi mengalami kesulitan untuk diaplikasi di Irak karena bertabrakan dengan latar belakang kultur dan agama. Seperti yang diungkapkan oleh Basham P.: *“Iraq’s democratization will be hindered by cultural and religious factors that neither stimulate nor foster political liberty”*. (Basham, P. (Januay 5, 2004).

## **PENUTUP**

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa; Keadaan perempuan Irak dalam politik mendapat kesempatan lebih besar pasca invasi Pasukan Koalisi.

Di sisi lain, dalam hal pendidikan dan pekerjaan, persentase perempuan Irak mengalami kemunduran yang drastis sejak tahun 2003. Sedangkan resiko menerima kekerasan di dalam rumah tangga dan di masyarakat mengalami peningkatan setelah invasi Pasukan Koalisi.

Sepanjang sejarah modern Irak, perempuan telah berperan aktif dalam segala aspek kemasyarakatan. Baik dalam aspek pendidikan, pekerjaan, intelektual, kreatifitas, sosial dan politik. Akan tetapi ketidakstabilan ekonomi dan politik telah mempengaruhi kehidupan dan hak perempuan Irak dalam beberapa dekade ini. Tentunya kultur suku dan tradisi patriarki adalah yang paling bertanggung jawab atas terkekangnya hak-hak perempuan Irak. Apa yang terjadi di Irak selama tahun 1979 hingga 2011 dapat dikaji melalui teori gender. Pada teori gender dengan istilah *“victim feminism”* yang percaya bahwa perempuan adalah warga kelas bawah yang selalu menjadi korban dari Patriarki. Pada penelitian ini ditemukan fakta dari para responden bahwa di bawah rezim Saddam yang otoriter, perempuan justru mendapatkan hak dalam kehidupan sosialnya. Perempuan pada rezim ini berhak untuk sekolah, untuk bekerja, dan bahkan untuk mengekspresikan dirinya melalui cara berpakaian. Disisi lain, perempuan hanya mempunyai sedikit akses terhadap

kebebasan berpolitik karena rezim otoriter yang penuh kolusi dan nepotisme. Sedangkan pada masa demokrasi, perempuan Irak mempunyai akses yang lebih besar terhadap politik. Akan tetapi kehidupan sosial mereka terancam karena sistem demokrasi yang diberlakukan ternyata membuat salah satu golongan garis keras berkuasa. Sehingga hukum Syari'ah yang bercampur dengan kultur patriarki Arab membatasi ruang gerak perempuan Irak pasca demokrasi. Ketidakstabilan Negara yang terus menerus telah merugikan perempuan, sehingga perempuan Irak merasa menjadi korban dengan keadaan yang tidak pernah stabil tersebut.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Bapak Ramzy Tadjoedin dan Bapak Hendra Kurniawan atas bimbingannya selama saya meneliti. Terima kasih kepada orang tua, suami dan anak saya tercinta, atas dukungan mereka peneliti bias merampungkan penelitian ini. Terakhir, terima kasih kepada bapak I Dewa Sadra atas bimbingan dan masukannya atas tata cara penulisan karya tulis ilmiah yang peneliti buat.

## DAFTAR PUSTAKA

Amnesty International. (2009). *“Trapped by violence: Women in Iraq”*  
Amowitz, L. L., Kim, G., Reis, C., Asher, J. L., & Iacopino, V. (2004). Human

---

rights abuses and concerns about women's health and human rights in southern Iraq. *Jama*, 291(12), 1471-1479

Basham, P. (Januay 5, 2004). *Can Iraq Be Democratic?*. Policy Analysis No. 505, Cato Institute.

Efrati, N. (2005). Negotiating rights in Iraq: Women and the personal status law. *The Middle East Journal*, Vol. 59, No. 4, 577-595.

Inter-Agency Informations and Analysis Unit (2012, March). *Women in Iraq Fact Sheet*

Ministry of Planning, Revolution and Development in Iraq, Ministry of Culture and Information, (1980). *Iraqi Government*

Souad Al-Azzawi (2011, March 9-11). *Decline Of Iraqi Women Empowerment Through Education Under the American Occupation of Iraq 2003-2011*.

Satya (2007). *Our Darkest Hour*, The Satya Interview with Yanar Mohammed. 15 juni 2012. <http://www.satyamag.com/feb07/mohammed.html> UNESCO and Education in IRAQ Fact Sheet (28 March 2003) [http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL\\_ID=11216&URL\\_DO=DO\\_TOPIC&URL\\_SECTION=201.html](http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=11216&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)

Woman's Commission for Refugee Women and Children. (2008). *Women, children and youth in the iraq crisis : a fact sheet*.